ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul Potensi Lembaga Politik Lokal Dan Civil Society Dalam Implementasi Otonomi Daerah, Studi Deskriptif: Kabupaten Tojo Una-Una Sebagai Pemekaran Kabupaten Poso ini secara garis besar ingin mengurai dua permasalahan utama. Yang pertama mendeskripsikan potensi pengorganisasian partisipasi masyarakat Tojo Una-Una oleh dua lembaga Politik di tingkat lokal yaitu DPRD Tojo Una-Una dan Partai Politik. Yang kedua adalah bagaimana potensi pengorganisasian masyarakat dalam mewujudkan kehidupan Demokrasi Politik di Kabupaten Tojo Una-Una. Inti permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah proses Implementasi Otonomi Daerah yang dilakukan Kabupaten Tojo Una-Una di tengah- tengah keterbatasan, sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran Poso sejak berlakunya UU no 32 tahun 2003, yang tentu saja memiliki keterbatasan terutama Sumber Daya Manusia masyarakat dan aparatur serta Keuangan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik tertentu dari potensi kelembagaan politik dan Civil Society di Kabupaten Tojo Una-Una dalam implementasi kebijakan Otonomi daearh.berdasarkan pada permasalahan yang diajukan, maka Realitas sosial serta politik yang di temukan dilapangan akan dibingkai dengan teori yang ada kemudian ditarik simpulan ilmiah.

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian Partsipasi Politik masyarakat Tojo Una-Una terkait dengan Implementasi Otonomi daerah banyak dilakukan oleh DPRD daripada Partai Politik. Partai Politik terlalu disibukkan dengan masalah kepentingan golongan terutama bagi Partai Politik yang meraih kemenangan di wilayah Tojo Una-Una pada Pemilu 2004 hal ini dapat dilihat dari data bahwa 34,28 % masyarakat lebih memilih DPRD sebagai saluran partisipasi daripada Partai Politik yang hanya sekitar 1,04%. namun demikian terdapat banyak kendala yang dihadapi DPRD dalam proses pengorganisasian baik secara internal maupun eksternal lembaga sehingga banyak bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum terakomodir. Temuan lain dalam penelitian ini adalah peran kekuatan Civil Society untuk membangun demokrasi Politik di Tojo Una-Una masih sangat minim, karena lembaga kemasyarakatan dan organisasi kempemudaan yang ada belum mampu membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan yang diambil maupun jalannya roda pemerintahan. Disisi lain hanya terdapat dua LSM sebagai Lembaga yang memiliki kecakapan manajerial dan memiliki kedekatan dengan kekuatan Civil Society.